

**KONFLIK MILITER DIVISI SILIWANGI DENGAN DIVISI
PANEMBAHAN SENOPATI DI SURAKARTA TAHUN 1948**

RINGKASAN SKRIPSI



Oleh :

Hery Setya Adi

10407141012

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014**

KONFLIK MILITER DIVISI SILIWANGI DENGAN DIVISI PANEMBAHAN SENOPATI DI SURAKARTA 1948

Oleh :
Hery Setya Adi dan Danar Widiyanta M.Hum

Abstrak

Perkembangan kemiliteran di Indonesia mulai menampakkan perubahan yang signifikan setelah proklamasi kemerdekaan dengan dibentuk suatu badan ketentaraan resmi yaitu BKR yang dalam perjalanannya kemudian diresmikan dengan nama TNI. Kondisi perang kemerdekaan dan intervensi dari pihak Belanda serta pergolakan politik dalam negeri memicu berbagai kemungkinan termasuk konflik militer yang melibatkan Divisi Siliwangi dengan Divisi Panembahan Senopati. Surakarta menjadi saksi bentrokan bersenjata antara kedua kesatuan tersebut hingga penumpasan pemberontak PKI. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kronologis tentang konflik militer antara Divisi Siliwangi dengan Divisi Panembahan Senopati yang di Surakarta tahun 1948.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis. Pertama, herusitik yang merupakan tahap pengumpulan data atau sumber-sumber sejarah yang relevan. Kedua, kritik sumber merupakan tahap pengkajian terhadap otentisitas dan kredibilitas sumber-sumber yang diperoleh yaitu dari segi fisik dan isi sumber. Ketiga, interpretasi yaitu dengan mencari keterkaitan makna yang berhubungan antara fakta-fakta yang telah diperoleh sehingga lebih bermakna. Keempat, historiografi atau penulisan yaitu penyampaian sintesis dalam bentuk karya sejarah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik militer di Surakarta yang melibatkan Divisi Siliwangi dan Divisi Panembahan Senopati adalah salah satu rencana penyesatan yang dibuat oleh FDR. Surakarta yang menjadi Sentral antara Yogyakarta sebagai Ibukota RI dan Madiun sebagai pusat Republik Sovyet dijadikan *wild west* untuk pengalihan perhatian. Pasukan Siliwangi yang hijrah dari Jawa Barat menjadi korban fitnah FDR dan Panembahan Senopati yang menjadi alat pergerakan bagi FDR terlibat dalam drama konflik bersenjata. Pemerintah melalui Jendral Sudirman kemudian mengambil langkah tegas dengan menempatkan Letnan Kolonel Gatot Subroto Sebagai Gubernur Militer Surakarta untuk menindak tegas segala pembangkangan dan tindakan mangkir yang dilakukan kedua kesatuan yang terlibat konflik. Babak penyelesaian konflik militer Surakarta ini adalah penumpasan FDR yang melebur dalam PKI dan melakukan pemberontakan di Madiun oleh pasukan Siliwangi dengan dibantu pasukan Panembahan Senopati yang setia kepada Republik Indonesia. Pasukan Siliwangi yang telah menyelesaikan tugasnya di Surakarta kemudian di Wingate kembali ke Jawa Barat untuk menyiapkan perang gerilya.

Kata kunci: Militer, Surakarta, 1948.

A. LATAR BELAKANG

Surakarta sebagai Karesidenan yang berdiri sendiri menjadi magnet yang menarik golongan oposisi pemerintah untuk memusatkan kegiatan dan memantau kelangsungan pemerintahan di Ibukota Yogyakarta. Tan Malaka sebagai pemimpin oposisi memusatkan kegiatan kirinya di Surakarta dengan melakukan provokasi dan kampanye-kampanye untuk menggoyangkan pemerintahan Kabinet Sutan Syahrir. Sutan Syahrir yang menghendaki diplomasi sebagai bentuk perjuangan kemerdekaan ternyata bertentangan dengan keinginan para pemuda yang menganggap revolusi adalah waktu yang penuh improvisasi dan kegairahan, kemerdekaan bukanlah suatu konsep politik tetapi suatu pengalaman kebebasan pribadi.¹ Kekecewaan para pemuda menjadi titik celah yang dimanfaatkan Tan Malaka dengan mencari dukungan dari partai politik dan badan perjuangan yang menghendaki perjuangan revolusi total dan pengakuan kemerdekaan seratus persen. Tanggal 4 Januari 1946 terbentuk “Persatuan Perjuangan” sebagai gerakan revolusi Tan Malaka dengan menetapkan Surakarta sebagai basis pergerakan dan “Minimum Program” sebagai dasar organisasinya.² Persatuan Perjuangan menjadikan revolusi sosial berupa gerakan-gerakan antiswapraja di Surakarta yang melemahkan status dan kedudukan pemerintahan Kraton Kasunanan dan Mangkunegaran di Surakarta.

Keamanan Surakarta berhasil dikacaukan dan memaksa pemerintah mengambil langkah penyelesaian, dalam hal ini adalah Sutan Syahrir sebagai pimpinan kabinet bersama jajaran stafnya dengan diketahui presiden, wakil presiden dan Jendral Sudirman menggelar sidang kabinet mendadak dan menghasilkan keputusan untuk membentuk Pemerintahan Daerah Rakyat dan Tentara. Pembentukan pemerintahan militer ini belum mampu mengatasi ketegangan dan kekacauan di Surakarta hingga masa transisi jatuhnya Kabinet

¹ Julianto Ibrahim, *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan; Kriminalitas dan Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta*, (Surakarta: Bina Citra Pustaka, 2004), hlm 156.

² *Ibid.*,

Sutan Syahrir karena pengkhianatan rekan-rekan dari partainya sendiri dalam sosialisasi perjanjian Linggarjati. Bersamaan dengan jatuhnya Kabinet Sutan Syahrir, serangan Belanda datang menduduki wilayah-wilayah penting yang merupakan wilayah pendukung ekonomi utama republik. Presiden Sukarno segera menunjuk pengganti Sutan Syahrir untuk melanjutkan jalannya pemerintahan, dan Amir Syarifudin terpilih untuk menggantikan Sutan Syahrir dan dengan segera membentuk kabinet baru dari orang-orang partainya sendiri. Singkat saja masa hidup Kabinet Amir Syarifudin yang terbentuk pada 3 Juli 1947 dan harus tumbang pada 23 Januari 1948³

Kabinet selanjutnya dipercayakan kepada Mohammad Hatta yang dianggap dekat dengan semua pihak dan dinilai mampu memecahkan permasalahan yang terjadi. Kabinet Muhammad Hatta terbentuk dalam masa tekanan dari berbagai arah dan desakan waktu menjelang Agresi Militer Belanda ke dua yang sudah diperkirakan oleh para negarawan dan Jendral Sudirman akan segera terjadi. Mohammad Hatta dalam kepemimpinannya di kabinet merancang program Rasionalisasi atau dikenal dengan Rekonstruksi dan Rasionalisasi (RERA)⁴ yang menjadi masalah baru dan mengundang protes dari banyak pihak yang dirugikan.

Perjanjian Renville disetujui oleh pemerintah Indonesia masih menyisakan permasalahan bagi Muhammad Hatta yaitu, point dalam perjanjian yang kemudian memaksa tentara dan barisan laskar merapat ke wilayah Republik Indonesia yang semakin sempit akibat perjanjian Renville.⁵ Aspek militer

³ Julianto Ibrahim, *op.cit.*, hlm 167., Jacque Leclerc,” Amir Syarifudin 75 Tahun “, *Prisma* , 1982, hlm 74-75.

⁴ RERA, Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh kabinet Hatta untuk merampingkan jumlah pasukan dan kesatuan TNI sesuai dengan tugas fungsi dan anggaran negara untuk Angkatan Bersenjata.

⁵ Ide Anak Agung Gde Agung, *Renville*,(Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1991), hlm 65.

persetujuan itu adalah perjanjian gencatan senjata. Divisi Siliwangi yang berkedudukan di Jawa Barat akhirnya hijrah ke Jawa Tengah guna mematuhi isi dari Perjanjian Renville dan sebagai bentuk ketaatan prajurit kepada pimpinan dan kepatuhan Pimpinan TNI kepada Republik Indonesia setelah menerima perintah Hijrah dari Kolonel Simatupang selaku utusan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada tanggal 1 Februari 1948⁶.

Pertikaian antar prajurit memanas di Surakarta ketika terjadi kekurangan stok logistik dan penuhnya markas tentara sehingga memicu rasa saling curiga antar kelompok. Di tambah ketika terjadi pembunuhan terhadap Letnan Kolonel Sutarto di kediamannya dan di dekat jasadnya ditemukan tanda identitas pasukan Divisi Siliwangi. Penculikan terhadap perwira-perwira Divisi IV Panembahan Senopati menjadi puncak konflik antar tentara yang berdiri dibawah naungan Republik Indonesia dan tentara yang berbaris di bawah naungan bendera PKI termasuk penentang RERA. Surakarta secara sengaja dipilih sebagai *wild west*.

Konflik intern TNI ini adalah bagian dari rencana tokoh-tokoh kiri untuk terus mengoyak keutuhan pemerintahan republik, pemimpin-pemimpin pasukan bersenjata yang dalam posisi diuntungkan atau dirugikan atau lebih mengedepankan nama besar kesatuan akhirnya terhasut dan terlibat dalam perang saudara yang mengacaukan Surakarta.

Historiografi merupakan rekonstruksi melalui proses menguji dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman dan peninggalan masa lampau.⁷ Adapun Historiografi yang digunakan dalam skripsi ini sebagai berikut. Pertama, Skripsi Yanuar Ridho N.A.Y.P berjudul “*Peranan Kolonel Gatot Subroto pada Masa Darurat Militer di Surakarta tahun 1947-1950*” skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana Gatot Subroto mengawali karirnya dalam dunia militer sebagai

⁶ A.E.Kawilarang, *Untuk Sang Merah Putih : Pengalaman 1942-1961*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan 1988), hlm 97-98.

⁷ Louis Gottschalk, *Understanding of History*, Ter. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press. 1986, hlm 32.

Tentara Hindia Belanda (KNIL), hingga kedatangannya ke Surakarta atas perintah Panglima Besar untuk menyelesaikan konflik dan kerusuhan yang terjadi di Surakarta pada 1948 hingga penumpasan pemberontakan PKI Madiun. Kedua adalah Skripsi Andi Nurma Utawaman berjudul “*Pemerintah Darurat Militer Surakarta dan Dampaknya dalam Pemerintahan Kota Surakarta Tahun 1948-1950*” membahas tentang kurun waktu tahun 1948-1950 Kota Surakarta dijadikan *wild west* baik oleh Belanda maupun kaum kiri atau golongan komunis. Banyak terjadi gejolak dan tindakan diluar kendali keamanan yang dilakukan oleh oknum oknum tentara sehingga merugikan kesatuan dan meluas pada kondisi keamanan di Surakarta. Panglima Besar atas perintah Presiden RI kemudian membentuk Pemerintah Darurat Militer Surakarta untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan mengingat Ibu Kota Negara saat itu berada di Yogyakarta yang terletak tidak jauh dari Surakarta.

Metode sejarah adalah suatu proses untuk menguji dan mengkaji kebenaran rekaman sejarah dan peninggalan-peninggalan masa lampau dengan menganalisa secara kritis terhadap data-data yang ada sehingga menjadi penyaji dan cerita yang dapat dipercaya.⁸ Menurut Louis Gottschalk ada empat prosedur dalam proses penelitian sejarah yaitu: pengumpulan data (heuristik), kritik sumber (verifikasi), penafsiran (interpretasi), dan penulisan (historiografi).⁹ Pendekatan-pendekatan yang digunakan peneliti adalah Pendekatan Sosiologi, Pendekatan Politik, Pendekatan militer dan pendekatan ekonomi.

⁸ Helius Syamsudin dan Ismaun, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996), hlm 153.

⁹ Nugroho Notosusanto, *Norma-norma dan penulisan Sejarah*, (Jakarta: Dephankam,1997), hlm. 19.

B. SITUASI MILITER DI SURAKARTA TAHUN 1948

Pemilihan Yogyakarta sebagai Ibu Kota negara adalah karena tawaran yang diberikan Sultan kepada Sukarno melalui seorang kurir yang berangkat dari Yogyakarta pada 2 Januari 1945.¹⁰ Perpindahan Ibu Kota ke Yogyakarta ini secara otomatis membawa serta perangkat pemerintahan Republik Indonesia serta berbagai macam masalah yang tidak bisa sepenuhnya dihindari di Jakarta. Kekuatan oposisi pemerintahan menjadi salah satu permasalahan Republik yang menjadi duri dalam daging dalam sebuah pemerintahan yang baru saja lahir. Surakarta dipilih menjadi markas kekuatan oposisi kelompok kiri yang dipimpin Tan Malaka berserta kekuatan-kekuatan baik partai politik maupun badan-badan perjuangan yang mendukungnya.¹¹

Surakarta menjadi lokasi yang strategis untuk terus mengoyak pemerintahan Republik di Yogyakarta dan menggerogoti Kabinet Sutan Syahrir yang memilih jalan diplomasi dengan Pemerintah Belanda. Kekuatan oposisi di bawah Tan Malaka tidak saja menimbulkan masalah Politik, tetapi juga masalah-masalah sosial. Keberadaan Tan Malaka dan persatuan perjuangan telah menjadikan revolusi sosial berupa gerakan anti swapraja di Surakarta sebagai bagian dari strategi menggoyang pemerintahan Sutan Syahrir di Yogyakarta. Gerakan-gerakan anti swapraja ini menyebabkan kedudukan Kraton menjadi sangat lemah dan sulit, sehingga status swapraja di Surakarta dapat dengan mudah diruntuhkan.

Kabinet Sutan Syahrir bersama pemerintahan Republik yang mengetahui perihal pergerakan golongan oposisi di Surakarta kemudian berani mengambil tindakan dengan mempertaruhkan diri untuk mendukung kedua Kraton dengan konsekuensi kedudukannya yang teroposisi sebagaimana Kraton dioposisi oleh kelompok-kelompok Komunis atau golongan kiri Tan Malaka.¹² Selain itu,

¹⁰ Sebuah Presentasi Majalah TEMPO, *Sri Sultan: Hari-Hari Hamengkubuwana IX* (Jakarta:Grafiti Press,1988), hlm 34.

¹¹ Julianto, *op.cit.*,hlm 102.

¹² Julianto, *op.cit.*, hlm 156.

pemerintah pusat berusaha melindungi harta milik Kraton dan pabrik-pabrik agar tidak jatuh ke tangan kaum oposisi pimpinan Tan Malaka dan persatuan perjuangannya.

Kondisi pemerintahan swapraja Surakarta semakin terdesak ketika tuntutan pembubaran Daerah Istimewa Surakarta terus berjalan, badan-badan perjuangan beberapa komponen masyarakat di Klaten dan Boyolali menuntut dihapusnya swapraja Surakarta. Situasi Surakarta yang semakin rumit kemudian melahirkan keputusan baru yaitu dengan mengangkat perwakilan pemerintah Pusat di Surakarta lewat maklumat dr. Soedarsono tanggal 23 Mei 1946 untuk mengembalikan suasana kondusif Surakarta dan mengambil tindakan untuk orang-orang yang telah melanggar aturan pemerintah. Agung A.K. Soerjo diangkat menjadi menjadi perwakilan Pusat di Surakarta.

Sidang kabinet darurat kemudian dilangsungkan menyusul kegagalan pemerintah mengatasi gempuran kelompok oposisi. Sidang kabinet darurat tersebut menghasilkan putusan untuk membentuk suatu pemerintahan militer di Surakarta dengan pertimbangan keadaan yang tidak bisa dikendalikan.¹³ Pemerintahan militer yang dibentuk disebut Pemerintahan Daerah Rakyat dan Tentara (PDRT) yang diprakarsai Kolonel Soetarto sebagai komandan divisi IV Surakarta dengan maklumat No.2 tanggal 1 Juni 1946.

Pemuda pemuda Surakarta yang tergabung dalam berbagai organisasi semi militer itu tidak membubarkan diri seperti yang diperintahkan oleh Jepang, mereka membentuk Angkatan Muda Tentara (AMT) yang terdiri dari bekas anggota PETA, *Heijo*, Legiun Mangkunegaran, Barisan Pelopor, Hisbullah, dan *Jibakutai*. Laskar-laskar ini yang kemudian menjadi cikal bakal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) hingga pada masanya setelah melalui proses yang panjang menjelma menjadi satuan militer profesional dalam satu wadah TNI sebagai tentara resmi di suatu negara merdeka.

¹³ Julianto, *op. cit.*, hlm 164.

Pemuda-pemuda Surakarta yang pernah mendapat pelatihan militer Jepang antara lain adalah Moeljadi Djojomartono, Moch.Idris, Mr. Soemodiningrat, Soetarto, Achmad Fadjar, GPH. Poerbonegoro, Soenarto Koesoemodirdjo, GPH. Jatikoesoemo, dan Sastowihardjo. Tokoh tokoh ini yang kemudian menjadi pemimpin berbagai laskar rakyat yang lahir di Surakarta dan menyatakan diri sebagai pembela kemerdekaan Republik Indonesia. Nama Soetarto dikenal ketika pada akhir Oktober 1945 diadakan pertemuan darurat seluruh komandan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan laskar di wilayah Surakarta untuk membicarakan sifat dan tujuan masa depan kekuatan militer di kota Solo. Dalam pertemuan itu digelar pemilihan jabatan komandan divisi yang diikuti Poerbonegoro, Soetarto, dan Soenarto dengan hasil aklamasi menunjuk Soetarto sebagai komandan Divisi TKR Solo.

Rencana Reorganisasi Muhammad Hatta juga pernah mengancam kedudukan Soetarto sebagai Panglima Panembahan Senopati dan kesatuannya yang dalam jumlah besar dan dinilai tidak memadai dari segi pendidikan militer dibandingkan dengan pasukan Siliwangi yang banyak memiliki perwira berpendidikan label negeri Belanda. Soetarto yang juga menentang Reorganisasi melakukan aksi protes dalam sebuah parade militer di mana Sutarto bersama pasukan Panembahan Senopati bersenjata lengkap pada 20 Mei 1948 di Solo mengajukan tuntutan agar pemerintah membatalkan rencana Reorganisasi karena dinilai tidak relevan atau tidak tepat waktu, karena bangsa Indonesia tengah menghadapi tekanan dari dalam maupun luar negeri.

Keberadaan kesatuan-kesatuan militer di Surakarta yang beragam semakin lengkap dengan datangnya prajurit hijrah Siliwangi dari Jawa Barat sebagai akibat dari perjanjian Renville. Prajurit Siliwangi yang hijrah ke Jawa Tengah dikelompokkan dalam dua Brigade Utama yaitu Brigade Letnan Kolonel Kusno Utomo dan Brigade Letnan Kolonel Sadikin.

Beberapa kondisi penunjang yang kemudian menjadikan Surakarta sebagai target wilayah kacau atau *wild west* diantaranya adalah posisi Ibu Kota Negara yang berada di Yogyakarta relatif dekat dengan Surakarta sehingga Surakarta menjadi lokasi berpusatnya golongan para oposisi pemerintah, Surakarta menjadi

tempat memantau arah kebijakan pemerintah dalam usaha diplomasinya dengan Belanda dan juga sebagai kota tawanan di mana keberadaan golongan oposisi selalu mengancam jalannya pemerintahan Republik Indonesia.

Kekacauan di Surakarta bermuara pada bentrokan dan kontak senjata antara kesatuan tempur Panembahan Senopati dan Kesatuan Siliwangi yang akan dijelaskan sebagai kajian utama dalam tulisan ini, namun di luar itu kekacauan di Surakarta masih terus berlanjut sesuai dengan rencana *wild west* yang disusun FDR sebagai bentuk protes terhadap kabinet Muhammad Hatta. Kelanjutan *wild west* Surakarta terus berjalan seiring rencana-rencana FDR/PKI untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah.

Tiga pilar kekuatan utama di Surakarta yang dipegang oleh FDR, Panembahan Senopati dan GRR kini berubah arah dengan menghilangnya pengaruh GRR Tan Malaka, dan bergabungnya FDR dan Senopati melawan kekuatan pemerintah yang dikendalikan oleh kabinet Muhammad Hatta dan dikawal oleh Siliwangi A.H.Nasution dalam melaksanakan langkah-langkah kebijakannya. Ketidakseimbangan kekuatan dan kapasitas serta dukungan menyebabkan Panembahan Senopati yang berbaris bersama FDR sebagai kekuatan militer yang menjadi korban Rasionalisasi Muhammad Hatta berada dalam situasi yang tidak menguntungkan.

Prajurit siliwangi tidak terlepas dari faktor penyebab kekacauan di Surakarta dan sekitarnya karena menurut beberapa laporan bahwa ada beberapa prajurit Siliwangi yang dengan sengaja membuat kerusuhan dengan tindakan kriminal, membeli tidak membayar, merampok dan tidak disiplin sehingga menjadi alasan politis untuk melakukan serangan terhadap Siliwangi. Alasan terkuat serangan Panembahan Senopati terhadap Siliwangi adalah terjadinya penculikan-penculikan terhadap perwira-perwira Panembahan Senopati yang kemudian tuduhan pelakunya mengarah pada Pasukan Siliwangi Batalyon Rukman di Tasikmadu. Serangan ini menjadi awal pertempuran atau perang saudara sesama TNI AD dan menjadi ukuran keberhasilan FDR dalam melancarkan rencana *wild west* nya di Surakarta

C. PASUKAN SILIWANGI HIJRAH KE SURAKARTA

Pembentukan Divisi Siliwangi berawal dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang diserukan oleh Presiden Soekarno pada masa awal kemerdekaan dalam keputusan tanggal 30 Agustus 1945.¹⁴ Awal pembentukan BKR di Jawa Barat adalah pada 27 Agustus 1945 dari pertemuan antara Residen Priangan, R. Puradireja dengan R. Sanusi Hardjadinata yang menghasilkan BKR Priangan di bawah pimpinan Arudji Kartawinta dan Omon Abdurachman sebagai wakilnya.¹⁵ Pada tanggal 20 Mei 1946 bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional formasi itu kemudian dilebur dalam satu divisi dengan nama Divisi Siliwangi. Tanggal 20 Mei ini kemudian diperingati sebagai hari jadi Divisi Siliwangi. Tiga hari kemudian tanggal 23 Mei dalam rapat seluruh komandan Jawa dan Madura A.H.Nasution terpilih sebagai Panglima Divisi Siliwangi dengan pangkat Jendral Mayor. Formasi ini menjadi susunan awal terbentuknya Divisi Siliwangi seperti yang disebutkan diawal dan pada perkembangannya formasi ini terjadi beberapa perubahan hingga menjelang hijrahnya Siliwangi.

Masa Agresi Militer Belanda I dimulai pada 21 Juli 1947.¹⁶ Jawa Barat diserang dengan Strategi Ujung (*speerpunter strategie*) oleh Divisi B pimpinan Mayjen S.De Waal dan Divisi C pimpinan Mayjen H.J.J.W. Durt Britt, kedua divisi ini mengandalkan mobilitas tinggi dengan dukungan pasukan artilleri dan bantuan udara. Serangan Belanda yang dengan mudah menghancurkan pertahanan TNI akhirnya memberikan pelajaran baru bahwa dengan strategi pertahanan linier dalam kondisi pasukan dan persenjataan yang kurang memadai hanya akan membuang tenaga karena TNI saat itu memang masih jauh secara kemampuan dan persenjataan bila dibandingkan dengan Belanda yang militernya lebih maju. Akhir Agustus 1947 pasukan Siliwangi mulai menyusun kembali kekuatan dan

¹⁴ Julius Pour, *Ign. Slamet Riyadi; Dari Mengusir Kempetai Sampai Menumpas RMS*, (Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 30.

¹⁵ R.H.A.Shaleh, *Mari Bung, Rebut Kembali*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm 102.

¹⁶ Himawan Soetanto, *Yogyakarta 19 Desember 1948, Jendral Spoor(Operate Kraai) versus Jendral Sudirman(Perintah Siasat No.1)*(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm 147.

kesatuannya dengan memanfaatkan kondisi alam atau medan pertempuran yang berupa pegunungan-pegunungan di mana pasukan TNI lebih mengenal dan menguasai medan dibanding pasukan Belanda. TNI menyusun kesatuannya dalam kantong-kantong pertahanan gerilya dengan mengikutsertakan unsur-unsur Pemerintahan RI dan rakyat yang dikenal dengan Perang Rakyat Semesta atau perang Gerilya TNI.¹⁷

Strategi perang gerilya ini dalam prakteknya mampu mengacaukan barisan pertahanan Belanda, bahkan gerakan anti gerilya yang dilancarkan Belanda tak mampu membendung serangan gerilya TNI. Di Jawa Barat perang gerilya oleh pasukan Siliwangi mampu melumpuhkan usaha perkebunan yang merupakan sektor ekonomi penting bagi Belanda hingga para pengusaha partikelir menuntut jaminan keamanan dari pihak Belanda. Kondisi ini kemudian membawa Indonesia dan Belanda dalam sebuah perundingan di bawah pengawasan Komisi Tiga Negara (KTN) yang dibentuk oleh PBB pada 27 Agustus 1947. Perundingan dilakukan di atas kapal perang Amerika U.S.Renville yang kemudian melahirkan Perjanjian Renville 17 Januari 1947 dimana perjanjian itu membawa dampak besar bagi pemerintahan RI yaitu jatuhnya kabinet Amir Syarifudin dan juga bagi TNI yaitu dengan menarik pasukan ke dalam wilayah republik yang kemudian dikenal dengan hijrahnya pasukan Siliwangi dari Jawa Barat.

Pasukan Siliwangi di Jawa Barat mendapatkan perintah hijrah dari Jendral Sudirman melalui "Tim Perhubungan" yang dibentuk di Yogyakarta untuk menyampaikan perintah hijrah secara langsung kepada panglima divisi dan komandan brigade Divisi Siliwangi. Tim perhubungan ini dipilih dari perwira yang dianggap mengenal baik pribadi para pimpinan Divisi Siliwangi. Tidak semua pasukan Siliwangi dihijrahkan karena sesuai perintah Jendral Sudirman agar sebagian pasukan tetap melakukan aksi-aksi gerilya terhadap Belanda untuk tetap menjaga *de facto* wilayah RI di Banten Jawa Barat

¹⁷ Taufik Abdullah dkk, *Manusia Dalam Kemelut Sejarah*, (Jakarta:LP3ES,1981), hlm 57.

Pemberangkatan prajurit hijrah Siliwangi secara teknis militernya dilakukan dalam dua eselon yaitu eselon I dibawah pimpinan A.E.Kawilarang dan didampingi Letnan Kolonel Kusno Utomo sebagai Kepala Staf dengan membawa batalyon-batalyon yang dipimpin Mayor Kemal Idris, Mayor A.Kosasih, Mayor Daeng dan Mayor Ahmad Wiranata Kusumah yang menempatkan basis pasukannya di Yogyakarta. Eselon II dibawah pimpinan Letnan Kolonel Abimanyu yang kemudian digantikan Letnan Kolonel Sadikin dengan kepala staf Mayor Syamsu dengan membawa batalyon-batalyon yang dipimpin Mayor Umar, Mayor Rukman, Mayor Sambas, dan Mayor Sentot Iskandardinata yang menempatkan basis pasukannya di Surakarta. Brigade cadangan Siliwangi di bawah pimpinan Letnan Kolonel Eddy Sukardi ditempatkan di Magelang.¹⁸

Surakarta menjadi salah satu tempat pemerintahan prajurit Siliwangi di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sadikin yang tergabung dalam Brigade II Siliwangi membawahi 4 Batalyon diantaranya batalyon I/Sunan Gunung Jati dibawah Mayor Rukman berkedudukan di Tasikmadu, Batalyon II/Tarumanegara dibawah Mayor Sentot Iskandardinata berkedudukan di Delanggu bersama satu kompi Cokrotulung, Batalyon III/ Ciremai dibawah Mayor Umar berkedudukan di Colomadu, dan Batalyon IV/Kian Santang dibawah Mayor Sambas Atmadinata berkedudukan di Ngawi yang kemudian dipindahkan ke Sragen. Brigade ini dikawal oleh Kompi III dari Batalyon Ciremai pimpinan Kapten Oking.¹⁹

Rencana Rasionalisasi yang programkan Muhammad Hatta juga menjadi masalah bagi pasukan Siliwangi, selain karena posisinya yang sedang hijrah di wilayah pertahanan divisi lain, rencana Rasionalisasi ini justru digunakan oleh FDR untuk menyebarkan fitnah bahwa rencana Rasionalisasi itu adalah salah satu upaya peleburan TNI dengan KNIL. Hasil rapat yang menjadi pedoman bagi rekonstruksi Divisi Siliwangi dengan tidak memecah kesatuan-kesatuan Siliwangi guna membantu memperkuat garis pertahanan di daerah-daerah. Divisi Siliwangi

¹⁸ Sedjarah Militer Kodam VI/Siliwangi, *Siliwangi dari Masa ke Masa* (Jakarta : Fakta Mahmuja, 1968), hlm 140-141.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 97.

dikelompokkan dalam Kesatuan Reserve Umum (KRU) dengan tiga puluh batalyon yang dikelompokkan dalam lima brigade dalam susunan batalyon-batalyon mobil untuk melakukan infiltrasi ke Jawa Barat

Rencana *wild west* Surakarta yang dirancang FDR seperti yang telah dijelaskan di bab awal juga menjadi persinggungan bagi pasukan Siliwangi dengan pasukan Panembahan Senopati yang merupakan kesatuan militer pro FDR. Konflik ini dimulai dengan peristiwa penembakan terhadap Kolonel Soetarto Panglima Komando Pertempuran Panembahan Senopati yang sebelumnya juga telah didahului sebab-sebab lain dan saling memupuk kebencian dan kecurigaan antar kesatuan. Serangan dilakukan terhadap markas-markas kesatuan Siliwangi di Surakarta dengan tuduhan penculikan dan pembunuhan yang menimpa para perwira Panembahan Senopati.

D. KONFLIK MILITER DI SURAKARTA TAHUN 1948

Program Rasionalisasi yang tetap dijalankan oleh pemerintahan Muhammad Hatta memaksa Soetarto untuk tunduk karena Jendral Sudirman sendiri yang datang ke Surakarta untuk menemui Soetarto. Sikap patuh prajurit dan protesnya terhadap rencana FDR untuk mengadakan pemberontakan kepada Pemerintah menjadi petaka bagi Soetarto ketika akhirnya dia masuk dalam daftar rencana FDR sebagai rintangan yang harus disingkirkan. Letnan Kolonel Suadi awalnya juga akan dibunuh bersama Soetarto, namun Letnan Kolonel Suadi bersedia menjadi Panglima Divisi IV menggantikan Soetarto dan menyerahkan kendali siasat FDR pada Letnan Kolonel Soejoto untuk meneruskan rencana FDR.²⁰ Kolonel Soetarto dibunuh dengan ditembak di depan rumahnya sendiri di Kampung Timuran pada 2 Juli 1948 pukul 19.30²¹ sebagai tindak lanjut rencana FDR membuat suasana kacau di Surakarta.

Kolonel Soetarto panglima Komando Pertempuran Panembahan Senopati (KPPS) memiliki pengaruh dan wibawa yang besar dikalangan pasukan

²⁰ *Ibid.*

²¹ ANRI, *Inventaris Arsip Kepolisian Republik Indonesia 1947-1949* No. 89.

Panembahan Senopati, hal ini selain Soetarto sebagai Panglima divisi, juga karena relasinya yang kuat dalam menjalin hubungan dengan golongan oposisi FDR serta tindakannya dalam merangkul segenap kesatuan tentara baik reguler maupun non-reguler yang ada di Surakarta dan menjadikan mereka sebagai badan ketentaraan resmi di bawah Komando Pertempuran Panembahan Senopati. Penembakan terhadap Soetarto itu membawa dampak pukulan moril yang berat bagi Pasukan Panembahan Senopati karena kehilangan sosok panglima yang mengayomi dan menghargai hak-hak prajurit sepenuhnya meskipun berasal dari kalangan tentara bawah. Kondisi Panembahan Senopati semakin tertekan dan terancam menyusul peristiwa penculikan atas perwira-perwiranya yang secara psikologis merupakan penghinaan bagi Kesatuan Panembahan Senopati. Penculikan ini terjadi pada 8 September 1948 terhadap Letnan Kolonel Suherman ketika menjalankan tugasnya untuk memimpin penyelidikan atas peristiwa pembunuhan Kolonel Soetarto.²²

Tanggal 20 Agustus 1948 markas Siliwangi dikepung atas perintah Sub Teritorial Commando (STC) karena tindakan Siliwangi dianggap sebagai gerombolan pengacau dan melalui Komando Daerah Militer (KDM) Karanganyar menuntut penyerahan anggota Siliwangi yang terlibat dalam aksi kriminal tersebut serta mengembalikan barang-barang yang telah diambil atau hasil dari penggedoran yang dilakukan gerombolan liar Siliwangi. Siliwangi menuntut balik kepada pihak KDM untuk menarik pasukan yang mengepung markas batalyonnya dan tuntutan itu juga tidak dipenuhi oleh pihak KDM sehingga ketegangan semakin memuncak pada 23 Agustus ketika Panembahan Senopati mengeluarkan ultimatum agar Batalyon Rukman (Siliwangi) menyerah dan perintah itu ditolak sehingga pada 24 Agustus 1948 markas Batalyon Rukman diserang dengan turut mengerahkan kekuatan rakyat. Serangan terhadap Batalyon Rukman dapat dipatahkan dan pihak penyerang berhasil dipukul mundur hingga dalam upaya penyelesaian dilakukan perundingan antara kedua pihak yang menghasilkan

²² David Charles Anderson , *Kudeta Madiun 1948*, (Yogyakarta : Media Pressindo 2008), hlm 33.

putusan pemenuhan tuntutan dari Komando Militer Kota (KMK) Surakarta, STC dan KPPS untuk menempatkan Batalyon Rukman di luar Surakarta.²³

Babak perseteruan berikutnya adalah peristiwa Srambatan yang melibatkan Mayor Slamet Riyadi dan dua Batalyon eks TLRI dengan pasukan Siliwangi kompi Lucas (Kompi Pengawalan Brigade Siliwangi II di bawah pimpinan Kapten Oking) dan dibantu oleh Kompi Komir dari Batalyon 2/Brigade II Siliwangi.²⁴ Serangan dimulai oleh pasukan Mayor Slamet Riyadi yang melakukan manuver latihan kemudian secara mendadak menyerang asrama pasukan Siliwangi. Serangan ini didahului dengan keluarnya ultimatum dari Komando Pertempuran Panembahan Senopati²⁵

Serangan terhadap Siliwangi di Surakarta membuat pasukan Siliwangi yang semula dalam posisi bertahan beralih menjadi posisi menyerang dengan mendatangkan bantuan dari luar kota Surakarta. Batalyon Siluman Merah pimpinan Mayor Achmad Wiranatakusumah, Batalyon Guntur/Brigade Siliwangi I pimpinan Mayor Daeng Mohammad, hizbullah, Barisan Banteng, dan Tentara Pelajar adalah pasukan pro pemerintah yang didatangkan untuk membantu pasukan Siliwangi di Surakarta.²⁶ Brigade Sadikin melancarkan serangan dengan agresif, merebut inisiatif menguasai dan mendesak pasukan Panembahan Senopati keluar dari kota Solo. Pertempuran terjadi lewat tengah hari dengan melibatkan Kompi Lukas yang bertahan di Srambatan meluas ke Panasan dan Tasikmadu dibantu tiga batalyon dari Yogyakarta melawan Batalyon Digdo dari KPPS dan

²³ Himawan Soesanto, *op. cit.*, hlm 194.

²⁴ *Ibid.*, 195.

²⁵ Tanggal 10 September 1948 Komandan Komando Pertempuran Panembahan Senopati mengeluarkan ultimatum kepada kesatuan yang bermarkas di Srambatan setelah peringatan pertama di atas ternyata tidak mendapatkan perhatian. Dalam ultimatum tersebut antara lain dinyatakan “jika sampai dengan tanggal : 13 September 1948 jam 14.00, lima orang perwira TNI (Panembahan Senopati) yang diculik tidak diserahkan kembali kepada KPPS akan diadakan tindakan tegas”. Arsip Kodam VII Diponegoro, *Sedjarah Kronologis TNI di Dalam Daerah Karesidenan Surakarta*.

²⁶ Himawan Soetanto, *op.cit.*, hlm 198.

Batalyon 2 Resimen Jadau yang pro FDR.²⁷ Pasukan Siliwangi berhasil menguasai Kota Solo pada 17 September 1948.

Kolonel Soeadi selaku Komandan PPS mengumpulkan sisa-sisa kekuatan Pesindo dan TLRI yang terpecah-pecah oleh serangan Siliwangi kemudian mengadakan serangan balasan dengan mendobrak pertahanan Barisan Banteng untuk menduduki kembali kota Solo pada 17 September 1948.²⁸ Upaya Kolonel Soeadi bersama TLRI dan Pesindo digagalkan oleh satuan-satuan Siliwangi yang telah menguasai kota dan kembali mereka dipukul mundur ke luar kota Solo. Bulan September 1948 seolah menjadi catatan kelam kota Surakarta karena tindakan kriminalitas, penculikan, pembunuhan, penggerebekan dan perang antar prajurit mewarnai hari-hari di bulan September di Surakarta.

Panglima Besar TNI Jendral Sudirman selaku pemimpin tertinggi angkatan perang yang memegang kendali atas seluruh kesatuan militer yang berdaulat di bawah nama besar Tentara Nasional Indonesia merasa bingung menghadapi situasi yang terjadi di Surakarta. Di satu sisi perannya sebagai Panglima tertinggi melihat prajuritnya termakan oleh hasutan partai-partai politik dan di sisi lain harus menjalankan perintah dari kabinet yang banyak merugikan kepentingan tentara karena semata merupakan kepentingan pemerintahan.

Jendral Sudirman menemui Letnan Kolonel Soeadi di Loji Gandrung (bekas kediaman Gubernur Surakarta zaman kolonial)²⁹ untuk menerima aduan dari pihak KPPS sementara Jaksa Agung Tirtawinata menyiapkan pertemuan untuk perundingan di Balai Kota Surakarta. Pertemuan di Balai Kota dibuka pukul 17.00 oleh Jaksa Agung Tirtawinata dan dihadiri oleh Panglima KPPS Letnan Kolonel Soeadi, Komandan Brigade II KRU Siliwangi Letnan Kolonel Sadikin, Kolonel Achmad Fajar dari Sub Teritorial Commando (STC) Surakarta, Mayor Achmadi Komandan Komando Militer Kota Solo, Mayor Soedjono Komandan

²⁷ Arsip Kodam VII Diponegoro, *Sedjarah Kronologis TNI di Dalam Daerah Karesidenan Surakarta*.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Julius Pour, *op.cit.*, hlm 79.

CPM Detasemen II, Residen Soediro Surakarta, Sjamsurizal Wali Kota Solo, dan Komisaris Saleh Sastronegoro Komandan Polisi Solo.³⁰

Pertemuan di Balai Kota Solo itu menghasilkan kesepakatan bahwa semua kesatuan bersenjata harus melakukan *Konsigneering* dan semua pasukan dilarang membawa senjata ke luar asrama. Patroli keamanan hanya boleh dilakukan oleh CPM,KMK dan Polisi Negara³¹. Kesepakatan yang tercapai dalam perundingan tidak memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak karena tuntutan dan tujuan masing-masing pihak yang berseteru tidak terpenuhi. Jendral Sudirman sebagai petinggi militer merasakan dilema atas keadaan itu, kemudian mengusulkan agar pasukan Siliwangi ditarik keluar dari Solo, atau secara total meninggalkan Surakarta secara bersama-sama dan menyerahkan secara penuh tanggung jawab atas penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban di Surakarta.³²

Sebagai seorang prajurit Jendral Sudirman menghargai otoritas Panembahan Senopati di Surakarta meskipun tidak suka menerima perintah dari atasan (Rasionalisasi), Panembahan Senopati tetap menjalankan langkah-langkah rasionalisasi. Pemerintah harus menghargai bahwa Panembahan Senopati memiliki kebanggaan tradisional dalam membela Republik dan nilai kebanggan ini harus diperhitungkan ketika merencanakan perubahan mendasar atas militer di wilayah Surakarta.³³

Pembicaraan lebih lanjut mengenai penyelesaian permasalahan di Surakarta dilakukan di Yogyakarta oleh Jendral Sudirman, A.H.Nasution dan Kolonel Gatot Subroto pada 16 September 1948.³⁴ Pertemuan itu menghasilkan keputusan pengangkatan Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer di Surakarta

³⁰ Sedjarah Militer Kodam VII Diponegoro, *Sirnaning Jakso Katon Gapuraning Ratu*, (Semarang : Jajasan Penerbit Diponegoro,1968), hlm 138.

³¹ *Harian Merdeka*, 15 September 1948

³² David Charles Anderson, op.cit., hlm 35. Soe Hok Gie, *Simpang Kiri dari Sebuah Djalan : Kisah Pemberontakan PKI Madiun September 1948*, Thesis.M.A . Universitas Indonesia, 1969, hal 175-176.

³³ *Merdeka*, 24 Juli 1948.

³⁴ Himawan Sutanto, op.cit., hlm 198.

yang berwenang atas semua alat negara serta berhak sepenuhnya menjalankan tugas-tugas dewan pertahanan.

Langkah yang dilakukan Kolonel Gatot Subroto adalah dengan mengeluarkan intruksi untuk semua angkatan bersenjata di Surakarta agar menghentikan tembak-menembak selambat-lambatnya tanggal 20 September 1948 pukul 24.00, dan keesokan harinya semua komandan pasukan harus melaporkan menghadap pada Gubernur Militer. Komandan pasukan yang menghadap kemudian akan dikumpulkan untuk membicarakan penyelesaian bersama atas masalah di Surakarta. Komandan pasukan yang tidak menghadap dan tidak patuh akan dianggap pemberontak dan akan ditumpas.³⁵ Bertepatan dengan keluarnya intruksi tersebut, pasukan Panembahan Senopati yang terlibat pertempuran dengan Siliwangi telah terdesak mundur ke luar kota dan melakukan pemberontakan di Madiun bersama FDR (Pemberontakan PKI Madiun).³⁶

Madiun merupakan kota besar ketiga di Jawa setelah Yogyakarta dan Surakarta pada tahun 1948 sehingga menjadi kota yang juga dipenuhi dengan pergolakan ideologi komunis dan sosialis.³⁷ Muso dalam perjalanan politiknya juga melakukan pidato provokasi di Madiun dalam rapat raksasa yang diselenggarakan untuk melakukan agitasi dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.³⁸ Pusat kegiatan dan pergerakan oposisi juga dipindahkan ke Madiun sejak Siliwangi hijrah ke Surakarta dan menjadikan Madiun sebagai sektor yang kuat dalam perjuangan jangka panjang. Langkah ini dilakukan dengan menarik

³⁵ Arsip Kodam VII Diponegoro, *Pengumuman No.13. Gubernur Militer Surakarta Gatot Subroto. 18-9-1948. Merdeka*, 20 September 1948.

³⁶ Dengan keluarnya intruksi Gubernur Militer tersebut , maka pasukan Panembahan Senopati mengalami demoralisasi, dan praktis tidak memiliki pilihan lain, mereka dianggap pengkhianat yang menimbulkan kekacauan di Kota Surakarta, dan jika menghadap sama halnya membawa diri pada penyerahan tanpa syarat kepada pemerintah. David Charles Anderson. *op.cit.*, hlm 47.

³⁷ David Charles Anderson, *op.cit.*,hlm 54.

³⁸ Himawan Sutanto, *op. cit.*, hlm 193.

kekuatan inti tentara pro FDR dari medan pertempuran Surakarta ke Madiun sebagai daerah pertahanan.

Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Presiden Sukarno merasa mendapat kejelasan atas segala peristiwa yang mendahului sebelum terjadinya perebutan kekuasaan di Madiun. Peristiwa konflik bersenjata Siliwangi dengan Panembahan Senopati penculikan dan pembunuhan yang mengacaukan Surakarta hingga Madiun *coup* merupakan rangkaian peristiwa yang sudah direncanakan FDR. Melalui pidatonya pada 19 September 1948 Presiden Sukarno menyatakan memecat Kolonel Dachlan dari ketentaraan karena telah berkhianat dan melanggar sumpah tentara.³⁹ Presiden Sukarno juga memohon dukungan dari segenap rakyat Indonesia untuk dengan segera menumbas Muso beserta kawanannya yang berkhianat dan merebut kembali Madiun agar masalah ini tidak berlarut-larut dan menyebabkan intervensi serta campur tangan Belanda yang saat itu masih bersengketa dengan Indonesia. Peryataan Presiden Sukarno tersebut segera diikuti dengan intruksi Panglima Besar Sudirman yang menetapkan Kolonel Sungkono sebagai Gubernur Militer Jawa Timur, Kolonel Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer Jawa Tengah, dan Menugaskan Brigade Sadikin (Siliwangi) untuk menyerbu Madiun dan menghancurkan PKI/Muso.⁴⁰

Episode penutup dalam rangkaian peristiwa ini adalah peristiwa *Long March* Divisi Siliwangi yang dilakukan pada 1 Desember 1948 berdasarkan perintah siasat no.1 dari Panglima Besar bagi Divisi Siliwangi untuk menyusup kembali ke Jawa Barat. Siliwangi melakukan upacara militernya yang terakhir di Solo sebelum kembali melakukan perjalanan jauh, Komandan Brigade Letnan Kolonel Sadikin membacakan ucapan terima kasih kepada Presiden Sukarno, dan

³⁹ Notosutarjo, *Peristiwa Madiun*, (Jakarta : Endang Pemuda, Api Islam, 1966), hlm 128-131. Himawan Soetanto, *op.cit.*, hlm 201.

⁴⁰ A.H.Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 8*. (Bandung : Angkasa, 1966), hlm 445

pada Divisi Siliwangi. Pemindahan kekuatan ini dilakukan untuk mempersiapkan pertahanan di seluruh wilayah menghadapi Agresi Militer Belanda yang kedua

E. KESIMPULAN

Ketegangan berhasil diciptakan antara dua kekuatan militer besar yang saat itu tengah berada di Surakarta. Konflik bersenjata Siliwangi dengan Panembahan Senopati terjadi di tiga titik utama yaitu markas Siliwangi di Tasikmadu, Srambatan dan pertempuran terakhir adalah serbuan TLRI/Panembahan Senopati di selatan kota Solo yang berhasil dipukul mundur oleh pasukan bantuan Siliwangi dari Yogyakarta. Panglima Besar Sudirman yang berkuasa atas angkatan perang mengambil langkah penyelesaian atas konflik yang terjadi dengan mengangkat Kolonel Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer Surakarta dan diberi kewenangan untuk menindak segala penyimpangan yang terjadi di Surakarta. Gatot Subroto dengan intruksi tangan besinya membuat semua kesatuan tunduk dan menghadap untuk menyelesaikan permasalahan secara hierarki militer.

FDR yang sejak jauh hari telah merencanakan perebutan kekuasaan di bawah pimpinan Amir Syarifudin mendapat energi baru dengan datangnya Muso yang kemudian mengambil alih posisi pemimpin FDR dan mulai melangkah menjalankan rencana politiknya bersamaan dengan kekalahan pendukungnya di Surakarta, FDR kemudian memproklamasikan berdirinya Sovyet Republik Indonesia dan menarik pasukannya yang telah kalah dan tersebar untuk memberontak dan menguasai Madiun sebagai basis pergerakan. Pemerintahan negara baru pimpinan Muso ini tidak berumur panjang karena Pemerintah Republik dengan segera memerintahkan pasukan TNI untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun tersebut.

F. DAFTAR PUSTAKA

- ANRI, *Inventaris Arsip Kepolisian Republik Indonesia 1947-1949 No. 89.*
- Arsip Kodam VII Diponegoro, *Sedjarah Kronologis TNI di Dalam Daerah Karesidenan Surakarta.*
- Arsip Kodam VII Diponegoro, *Pengumuman No.13. Gubernur Militer Surakarta Gatot Subroto. 18-9-1948. Merdeka*, 20 September 1948.
- David Charles Anderson , *Kudeta Madiun 1948*, Yogyakarta : Media Pressindo 2008.
- Harian Merdeka*, 15 September 1948
- Helius Syamsudin dan Ismaun, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Jakarta: Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996.
- Himawan Soetanto, *Yogyakarta 19 Desember 1948, Jendral Spoor(Operate Kraai) versus Jendral Sudirman(Perintah Siasat No.1)*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Ide Anak Agung Gde Agung, *Renville*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1991.
- Jacque Leclerc,” Amir Syarifudin 75 Tahun “, *Prisma* , 1982,
- Julianto Ibrahim, *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan; Kriminalitas dan Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta*, Surakarta: Bina Citra Pustaka, 2004.
- Julius Pour, *Ign. Slamet Riyadi; Dari Mengusir Kempetai Sampai Menumpas RMS*, Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Kawilarang A.E, *Untuk Sang Merah Putih : Pengalaman 1942-1961*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan 1988.
- Louis Gottschalk, *Understanding of History*, Ter. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Merdeka*, 24 Juli 1948.
- Nasution A.H, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 8*. Bandung : Angkasa, 1966.
- Notosutarjo, *Peristiwa Madiun*, Jakarta : Endang Pemuda, Api Islam, 1966.

Nugroho Notosusanto, *Norma-norma dan penulisan Sejarah*, Jakarta: Dephankam,1997.

R.H.A.Shaleh, *Mari Bung, Rebut Kembali*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.

Sebuah Presentasi Majalah TEMPO, *Sri Sultan: Hari-Hari Hamengkubuwana IX*, Jakarta:Grafiti Press,1988.

Sedjarah Militer Kodam VII Diponegoro, *Sirnaning Jakso Katon Gapuruning Ratu*, Semarang : Jajasan Penerbit Diponegoro,1968.

Soe Hok Gie, *Simpang Kiri dari Sebuah Djalan : Kisah Pemberontakan PKI Madiun September 1948*, Thesis.M.A . Universitas Indonesia, 1969.

Taufik Abdullah dkk, *Manusia Dalam Kemelut Sejarah*, Jakarta:LP3ES,1981.